



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SETIABUDI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN KEMITRAAN**
3. NHK : **639663**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 894.500.000

1. MOBIL, HONDA HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.009.074.580

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.473.574.580

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.473.574.580

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.